

Judul : Bentuk panja BBL, komisi IV optimalkan potensi Rp 22 triliun
Tanggal : Sabtu, 27 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Bentuk Panja BBL Komisi IV Optimalkan Potensi Rp 22 Triliun

ANGGOTA Komisi IV Riyono mengungkapkan pembentukan Panitia Kerja Benih Bening Lobster (Panja BBL) guna membenahi tata kelola BBL. Panja ini dibentuk secara kolaboratif dan substantif agar potensi hampir Rp 22 triliun dari hulu hingga hilir bisa dimaksimalkan bagi nelayan serta negara.

Dia bilang, kajian ilmiah dan data empiris menunjukkan potensi bisnis maupun manfaat sosial BBL selama ini baru dinikmati sebagian kecil pelaku usaha. Hanya sekitar 20 persen yang dirasakan nelayan tangkap dan pembudidaya, padahal tersedia hampir 1,2 miliar benur dengan 417 juta ekor bisa dimanfaatkan.

Menurutnya, BBL adalah karunia Tuhan bagi masyarakat pesisir yang bernilai ekonomi besar. Namun, kapasitas dan regulasi saat ini belum mampu mengoptimalkan potensi itu sebagai daya ungkit penerimaan negara maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. "Makanya aspek regulasi dan kesejahteraan jadi fokus pembahasan Panja," ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Kata Riyono, hasil kunjungan lapangan dan pengalaman pengelolaan selama ini menunjukkan usaha pembudidayaan BBL mampu memberikan keuntungan cukup baik. Melalui sistem koperasi, masyarakat memperoleh keuntungan minimal Rp 35 juta dengan modal sekitar Rp 130 juta. Karena itu, peluang pengembangannya masih terbuka lebar di berbagai daerah.

Selanjutnya, optimalisasi

potensi BBL untuk kegiatan budi daya dinilai mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Perkiraanannya mencapai antara 75 ribu hingga 100 ribu tenaga kerja dari hulu sampai hilir. Untuk itu, negara didorong hadir mengawal rantai usaha mulai benur di laut hingga lobster siap konsumsi.

Potensi ekspor lobster Indonesia saat ini, sambung Riyono, masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain di pasar dunia. Kontribusinya baru sekitar 0,5 persen atau menempati peringkat ke-29 eksportir global. Sementara Kanada menguasai sekitar 40 persen pasar dan Vietnam berada pada kisaran tujuh persen.

Indonesia, lanjutnya, berpeluang jadi pesaing kuat dalam perdagangan lobster dunia apabila didukung kemauan politik yang kuat. Pembenaan tata kelola serta regulasi juga diperlukan agar aktivitas yang selama ini berada di wilayah abu-abu dapat diatur secara legal. "Dengan demikian, negara dan masyarakat sama-sama memperoleh manfaat," ucapnya.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menambahkan, Panja BBL harus bekerja keras dalam mengurai berbagai persoalan ekspor benih lobster. Penguraian berbagai persoalan itu perlu mencakup praktik penyelundupan, oknum yang terlibat, lemahnya pengawasan, serta berbagai celah regulasi yang dimanfaatkan mafia karena kerugian negara terus berlangsung. ■ PYB